



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Gusti Johan Idrus Nomor 12, Pontianak, Kalimantan Barat 78121
Telepon (0561) 732078, Faksimile (0561) 766144
Laman <http://www.bpsdm.kalbarprov.go.id> Pos-el bpsdm2@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 327/BPSDM/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah mengatur mengenai penyusunan Indikator Kinerja Individu di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 137).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Individu Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Individu merupakan panduan yang digunakan oleh masing-masing individu di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan capaian kinerja individu serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja individu sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi/Pengukuran Kinerja Internal secara berkala di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia




Marjani

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 327 TAHUN 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023

Tugas pokok : Membantu Gubernur Kalbar melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan

- Fungsi :
- a. Perumusan program kerja di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPSDM;
 - h. Pelaksanaan administrasi BPSDM;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan

Kinerja Utama Atau Tujuan/Sasaran Strategis/ Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi mendapatkan predikat minimal baik dibandingkan dengan Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	Rancangan Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026	-



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Marjani
Marjani

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 327 TAHUN 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

- Tugas pokok :
- a. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BPSDM.
 - b. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan kompetensi teknis.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan serta

bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

- Fungsi :
- a. Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
 2. penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi, umum dan aparatur;
 3. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja BPSDM
 4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BPSDM;
 5. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi serta umum dan aparatur di lingkungan BPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
 8. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPSDM;
 9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
 10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPSDM; dan
 11. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program kerja di Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;

2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;
 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengeordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;
 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;
 6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi,

pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
 3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
 6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi

pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan.

A. Jabatan Administrator

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks SAKIP Perangkat Daerah	Target indikator program ini ditetapkan berdasarkan target kinerja program yang termuat dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.	Sekretaris	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
	Indeks RB Perangkat Daerah	Target indikator program ini ditetapkan berdasarkan target kinerja program yang termuat dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.	Sekretaris	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Target Indikator program ini diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Kompetensi yang disusun yang disusun pada tahun 2024 dengan Jumlah Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Kompetensi yang seharusnya disusun yang disusun pada tahun 2024	Kepala Bidang (Kabid) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK)	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis	Target indikator program ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah alumni Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah target peserta seluruh kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Tahun 2024.	Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT)	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	Target indikator program ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah alumni Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah target peserta seluruh kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Tahun 2024.	Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF)	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
	Persentase Anggota DPRD Kab/Kota yang memiliki kompetensi pemerintahan	Target indikator program ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah alumni Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah target peserta seluruh kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Tahun 2024.	Kabid PKMF	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional (sertifikasi kompetensi)	Target indikator program ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah peserta Uji Kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi dibandingkan dengan jumlah target peserta seluruh kegiatan pengembangan kompetensi SDM Aparatur.	Kabid SKPK	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

B. Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Pada Bidang SKPK

1. Jabatan Fungsional Widyaiswara

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi yang diperoleh	Jumlah sertifikat pengembangan kompetensi yang diperoleh pada saat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara	STTPP minimal 10 JP

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah bahan ajar sesuai spesialisasi yang dilaksanakan	Jumlah bahan ajar yang disusun guna mendukung tugas pengajaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BPSDM Prov. Kalbar	
	Jumlah bahan tayang sesuai spesialisasi yang dilaksanakan	Jumlah bahan tayang yang disusun guna mendukung tugas pengajaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah GBPP/ RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasi diklat yang dilaksanakan	Jumlah GBPP/ RBPMD dan SAP/RP yang disusun guna mendukung tugas pengajaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	
	Jumlah Soal/Materi Ujian Pelaksanaan Pengembangan kompetensi yang disusun	Jumlah Soal/Materi Ujian yang disusun dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Soal/materi yang disusun untuk pelaksanaan Pre test – post test, komprehensif test, dan kasus

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	jumlah jam pelaksanaan tatap muka/ jam pembelajaran (JP) yang dilaksanakan	jumlah jam tatap muka/jam pelaksanaan pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	
	Jumlah laporan kegiatan pembimbingan	Jumlah laporan kegiatan pembimbingan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) pelatihan	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Laporan memuat nama peserta, judul, nama kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan
	Jumlah Laporan pelaksanaan pendampingan OL/PKL/ Benchmarking	Jumlah Laporan pelaksanaan pendampingan OL/PKL/ Benchmarking dalam 1 (satu) Tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Kertas Kerja / Proyek Perubahan/ Laporan Aktualisasi peserta pelatihan	Jumlah Kertas Kerja Proyek Perubahan/ Laporan Aktualisasi peserta pelatihan dalam 1 (satu) pelatihan	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	Jumlah pendampingan paling banyak 5 (lima) kertas kerja per angkatan
	Jumlah laporan pemeriksaan hasil ujian peserta pengembangan kompetensi	Jumlah laporan pemeriksaan hasil ujian peserta pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Pemeriksaan terhadap hasil ujian pre test. post – test, komprehensif test, dan kasus.
	Jumlah laporan Coaching pada proses penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan	Jumlah laporan Coaching yang dilaksanakan (Laporan/ program)	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di BPSDM	Jumlah laporan keterlibatan dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di BPSDM	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	
	Jumlah laporan evaluasi kinerja Widyaiswara	Jumlah laporan evaluasi kinerja Widyaiswara yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	
	Jumlah laporan penyusunan modul dan/atau kurikulum	Jumlah laporan keterlibatan dalam penyusunan modul dan/atau kurikulum dalam 1 (satu) tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah artikel dalam bidang spesialisasi keahlian dan lingkup kediklatan yang disusun	Jumlah artikel dalam bidang spesialisasi keahlian dan lingkup kediklatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	
	Jumlah laporan pelaksanaan seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang kediklatan/ pengembangan kompetensi ASN	Jumlah laporan tentang peran serta Widyaiswara dalam pelaksanaan seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang kediklatan/ pengembangan kompetensi ASN	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	Keterlibatan Pejabat Fungsional Widyaiswara sebagai Narasumber, ketua panitia, moderator, peserta, ataupun anggota panitia
	Jumlah laporan pembimbingan kepada Widyaiswara dibawah jenjang jabatannya	Jumlah laporan pelaksanaan pembimbingan kepada Widyaiswara dibawah jenjang jabatannya dalam 1 (satu) tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di wilayah Provinsi Kalbar	Jumlah bahan ajar sesuai spesialisasi yang dilaksanakan	Jumlah bahan ajar yang disusun guna mendukung tugas pengajaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar
	Jumlah bahan tayang sesuai spesialisasi yang dilaksanakan	Jumlah bahan tayang yang disusun guna mendukung tugas pengajaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah GBPP/ RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasi diklat yang dilaksanakan	Jumlah GBPP/ RBPMD dan SAP/RP yang disusun guna mendukung tugas pengajaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar
	Jumlah Soal/Materi Ujian Pelaksanaan Pengembangan kompetensi yang disusun	Jumlah Soal/Materi Ujian yang disusun dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Soal/materi yang disusun untuk pelaksanaan Pre test – post test, komprehensif test, dan kasus yang mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	jumlah jam pelaksanaan tatap muka/ jam pembelajaran (JP) yang dilaksanakan	jumlah jam tatap muka/jam pelaksanaan pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar
	Jumlah laporan kegiatan pembimbingan	Jumlah laporan kegiatan pembimbingan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) pelatihan	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Laporan m emuat nama peserta, judul, nama kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Laporan pelaksanaan pendampingan OL/PKL/ Benchmarking	Jumlah Laporan pelaksanaan pendampingan OL/PKL/ Benchmarking dalam 1 (satu) Tahun	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/ BPSDM/2023	Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar
	Jumlah Kertas Kerja / Proyek Perubahan/ Laporan Aktualisasi peserta pelatihan	Jumlah Kertas Kerja Proyek Perubahan/ Laporan Aktualisasi peserta pelatihan dalam 1 (satu) pelatihan	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015	Jumlah pendampingan paling banyak 5 (lima) kertas kerja per angkatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar

Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah laporan pemeriksaan hasil ujian peserta pengembangan kompetensi	Jumlah laporan pemeriksaan hasil ujian peserta pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, bimtek, dan workshop	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	Pemeriksaan terhadap hasil ujian pre test. post – test, komprehensif test, dan kasus yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar
	Jumlah laporan Coaching pada proses penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan	Jumlah laporan Coaching yang dilaksanakan (Laporan/ program)	Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, dan Widyaiswara Ahli Muda	Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalbar

2. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Modul/ Kurikulum Pelatihan yang disusun	Jumlah Kurikulum Pelatihan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Pelatihan Teknis yang dilakukan evaluasi pasca penyelenggaraannya	Jumlah Pelatihan Teknis yang dilakukan evaluasi pasca penyelenggaraannya dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi izin penyelenggaraannya	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi izin penyelenggaraannya dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di lingkungan Provinsi Kalbar dan Kabupaten/ Kota se-Kalbar	ASN yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah ASN yang lulus sertifikasi kompetensi pada tahun berjalan	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan uji validitas instrumen kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	jumlah laporan pelaksanaan uji validitas Instrumen Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen rancangan pedoman perkonsultasian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah dokumen rancangan pedoman perkonsultasian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang dilaksanakan oleh Bidang SKPK dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen pendukung pengelolaan kelembagaan	Jumlah dokumen pendukung pengelolaan kelembagaan BPSDM yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembangan kompetensi dan sumber belajar	Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembangan kompetensi dan sumber belajar yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah jurnal yang terbit	Jumlah jurnal ilmiah yang disusun dan diterbitkan pada tahun berjalan	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen pembinaan profesi	Jumlah dokumen pembinaan profesi kewidyaiswaraan yang disusun pada tahun berjalan	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Laporan pemantauan pemenuhan jam pelajaran pengembangan kompetensi per tahun	Jumlah Laporan pemantauan pemenuhan jam pelajaran pengembangan kompetensi yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah edisi majalah	Jumlah edisi majalah Profesional BPSDM yang diterbitkan pada tahun berjalan	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah aplikasi	Jumlah aplikasi pengembangan kompetensi yang dikembangkan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Podcast pengembangan kompetensi	Jumlah Podcast pengembangan kompetensi yang ditayangkan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan - Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimda, JPT, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan pemantauan kegiatan pemenuhan jam pengembangan kompetensi per tahun	Jumlah laporan pemantauan kegiatan pemenuhan jam pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021	
	Jumlah Pelatihan Manajerial yang dilakukan evaluasi pasca penyelenggaraannya	Jumlah Pelatihan Manajerial yang dilakukan evaluasi pasca penyelenggaraannya dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kompetensi ASN dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Pelatihan yang terfasilitasi penjaminan mutu penyelenggaraannya	Jumlah Pelatihan yang terfasilitasi penjaminan mutu penyelenggaraannya dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah kajian Implementasi Corporate University	Jumlah kajian Implementasi Corporate University dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

3. Pelaksana Bidang SKPK

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/ Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Bahan Pendukung Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	Jumlah Peserta Uji Kompetensi yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Tempat Uji Kompetensi Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah data peserta Uji Kompetensi	Jumlah data peserta Uji Kompetensi yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Tempat Uji Kompetensi Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi untuk penerbitan sertifikat	Jumlah Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi untuk penerbitan sertifikat yang tersedia dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Tempat Uji Kompetensi Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Majalah Profesional Aparatur yang diterbitkan	Jumlah Majalah Profesional Aparatur yang diterbitkan dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Tempat Uji Kompetensi Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen diklat/pelatihan yang dievaluasi pasca penyelenggaraan diklat	Jumlah dokumen diklat/pelatihan yang dievaluasi pasca penyelenggaraan++6 diklat yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Kartu Kendali Widyaiswara	Jumlah Kartu Kendali Widyaiswara yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Data Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Widyaiswara	Jumlah Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Widyaiswara yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Data Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Jurnal yang diterbitkan	Jumlah Jurnal yang diterbitkan dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Data Bidang SKPK dan Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Podcast yang ditayangkan	Jumlah Podcast yang ditayangkan dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Data Bidang SKPK dan Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan Profesi Kewidyaiswaraan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan Profesi Kewidyaiswaraan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Surat Dinas Nota Pengajuan Dana (NPD) per kegiatan	Jumlah Data pengajuan anggaran per bulan/triwulan yang disusun pada tahun berjalan	Pengelola Keuangan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) per kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) per kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Data Pengajuan Anggaran yang disusun	Jumlah Data Pengajuan Anggaran yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Data Realisasi Anggaran per triwulan yang disusun	Jumlah Data Realisasi Anggaran per triwulan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan Bidang SKPK	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

C. Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Pada Bidang PKMF

1. Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi dalam 1 tahun anggaran	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen desain program, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen desain program, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang SKPK	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen rancangan pedoman layanan perkonsultasian pengembangan kompetensi pegawai ASN	Jumlah dokumen rancangan pedoman layanan perkonsultasian pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dilaksanakan oleh Bidang PKMF dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Bidang PKMF dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi pada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi pada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PKMF dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Dokumen Renja Perangkat Daerah	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Dokumen Renja Perangkat Daerah	
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Orientasi PPPK	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	Dokumen Renja Perangkat Daerah	
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersusunnya Laporan Tahunan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Tahunan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Tahunan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya pendampingan/pemantauan terhadap proses pembelajaran	Jumlah kegiatan yang dilakukan pendampingan	Jumlah kegiatan yang dilakukan pendampingan dalam 1 tahun anggaran	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

2. Pelaksana Bidang PKMF

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Surat Fasilitasi Narasumber	Jumlah Surat Fasilitasi Narasumber	Jumlah Surat Fasilitasi Narasumber yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelenggara Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Surat Fasilitasi Calon Peserta	Jumlah Surat Fasilitasi Calon Peserta	Jumlah Surat Fasilitasi Calon Peserta yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Pemanggilan Peserta	Jumlah Surat Pemanggilan Peserta	Jumlah Surat Pemanggilan Peserta yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Soal Pre Test dan Post Test Peserta	Jumlah Data Soal Pre Test dan Post Test Peserta	Jumlah Data Soal Pre Test dan Post Test Peserta yang tersedia dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya pendampingan/ pemantauan terhadap proses pembelajaran	Jumlah kegiatan yang dilakukan pendampingan	Jumlah kegiatan yang dilakukan pendampingan	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Buku Nota Dinas	Jumlah Pencatatan Buku Nota Dinas	Jumlah Pencatatan Buku Nota Dinas yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Buku Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Pencatatan Buku Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Pencatatan Buku Surat Masuk dan Surat Keluar yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Absensi Rapat, Absensi Pembukaan dan Penutupan serta Absensi Peserta	Jumlah Absensi Rapat, Absensi Pembukaan dan Penutupan serta Absensi Peserta	Jumlah Absensi Rapat, Absensi Pembukaan dan Penutupan serta Absensi Peserta yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Berkas Arsip Kegiatan	Jumlah Berkas Arsip Kegiatan	Jumlah Berkas Arsip Kegiatan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Fasilitas Peminjaman Ruang Kelas dan Asrama	Jumlah Nota Dinas Fasilitas Peminjaman Ruang Kelas dan Asrama	Jumlah Nota Dinas Fasilitas Peminjaman Ruang Kelas dan Asrama yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Fasilitas Penjemputan dan Pengantaran Narasumber	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	Jumlah Kegiatan Penjemputan dan Pengantaran Narasumber yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya dokumen sertifikat peserta, piagam peserta terbaik dan piagam penghargaan Narasumber	Jumlah dokumen sertifikat peserta, piagam peserta terbaik dan piagam penghargaan narasumber	Jumlah dokumen sertifikat peserta, piagam peserta terbaik dan piagam penghargaan narasumber yang tersedia dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya buku biodata Narasumber	Jumlah buku biodata Narasumber	Jumlah buku biodata Narasumber yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Buku Pendamping kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Buku Pendamping kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Buku Pendamping kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Buku Panduan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Buku Panduan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Buku Panduan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Undangan Pembukaan dan Penutupan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Surat Undangan Pembukaan dan Penutupan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Surat Undangan Pembukaan dan Penutupan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Jadwal Petugas Pendamping dan Petugas Panitia lainnya	Jumlah Jadwal Petugas Pendamping dan Petugas Panitia lainnya	Jumlah Jadwal Petugas Pendamping dan Petugas Panitia lainnya yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Berkas SPJ Keuangan kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Berkas SPJ Keuangan kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Berkas SPJ Keuangan kegiatan pengembangan kompetensi yang disusun dan disiapkan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya NPD Kegiatan	Jumlah NPD Kegiatan	Jumlah NPD Kegiatan yang disusun dan disiapkan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya LPJ	Jumlah LPJ Kegiatan	Jumlah LPJ Kegiatan yang disusun dan disiapkan dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya penginputan data transferan rekening dan pemesanan belanja e-purchasing	Jumlah dokumen penginputan	Jumlah dokumen penginputan data transferan rekening dan pemesanan belanja e-purchasing	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya dokumentasi foto dan berkas notulensi rapat	Jumlah dokumentasi foto dan berkas notulensi rapat	Jumlah dokumentasi foto dan berkas notulensi rapat yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyelola Penyelenggaraan Diklat Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis pengembangan Kompetensi Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Keputusan Penunjukan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan pengembangan kompetensi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis pengembangan Kompetensi Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Keputusan Penunjukan Peserta Kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukan Peserta Kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukan Peserta Kegiatan pengembangan kompetensi yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis pengembangan Kompetensi Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Permohonan kode registrasi alumni	Jumlah Surat Permohonan kode registrasi alumni	Jumlah Surat Permohonan kode registrasi alumni yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Analisis pengembangan Kompetensi Bidang PKMF	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

D. Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Pada Bidang PKT

1. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT)	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKT	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen desain program, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen desain program, Pengembangan Kompetensi Teknis yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKT	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah dokumen rancangan pedoman layanan perkonsultasian pengembangan kompetensi pegawai ASN	Jumlah dokumen rancangan pedoman layanan perkonsultasian pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dilaksanakan oleh Bidang PKT dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKT	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Bidang PKT dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKT	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	
	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi pada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi pada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PKT dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda Bidang PKT	Permenpan RB No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 1513/BPSDM/2023	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya konsep naskah pedoman/panduan pelaksanaan pelatihan	Jumlah konsep naskah pedoman/panduan pelaksanaan pelatihan	Jumlah konsep naskah pedoman/panduan pelaksanaan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terpantaunya proses pembelajaran pelatihan	Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran pelatihan	Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya konsep naskah sertifikat pelatihan	Jumlah konsep naskah sertifikat pelatihan	Jumlah konsep naskah sertifikat pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya data Lulusan peserta pengembangan kompetensi	Jumlah data Lulusan peserta pengembangan kompetensi	Jumlah data Lulusan peserta pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksana pendampingan/pemantauan terhadap proses pembelajaran	Jumlah kegiatan yang dilakukan pendampingan	Jumlah kegiatan yang dilakukan pendampingan dalam 1 (satu) tahun	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

2. Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN	Jumlah dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis untuk ASN yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Ahli Pertama Bidang PKT	Permenpan RB No. 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
Tersedianya Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis SDMA Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber/Fasilitator Kegiatan Kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber/Fasilitator Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis SDMA Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Keputusan Penunjukkan Peserta Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukkan Peserta Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Penunjukkan Peserta Kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis SDMA Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya surat permohonan kode registrasi alumni	Jumlah Surat permohonan kode registrasi alumni	Jumlah Surat permohonan kode registrasi alumni yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Analisis SDMA Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya Pendampingan/ Pemantauan terhadap proses pembelajaran	Jumlah Kegiatan yang dilakukan pendamping	Jumlah Kegiatan yang dilakukan pendamping dalam 1 tahun	Analisis SDMA Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

3. Pelaksana Bidang PKT

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan	Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan Kompetensi	Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan Kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber/ Fasilitator Kegiatan Kompetensi yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Surat Keputusan Penunjukkan Peserta Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Surat Keputusan Penunjukkan Peserta Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Surat Keputusan Penunjukkan Peserta Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Surat Permohonan kode registrasi alumni	Surat Permohonan kode registrasi alumni	Jumlah Surat Permohonan kode registrasi alumni yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya absensi peserta	Absensi peserta	Jumlah peserta yang mengisi absensi yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya buku panduan penyelenggaraan kegiatan	Buku panduan penyelenggaraan kegiatan	Jumlah panduan penyelenggaraan kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Buku pendamping pengajar penyelenggaraan kegiatan	Buku pendamping pengajar penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Buku pendamping pengajar penyelenggaraan kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Data alumni pengembangan kompetensi teknis	Data alumni pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Data alumni pengembangan kompetensi teknis yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Penyelenggara Diklat Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Berkas SPJ Keuangan Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Berkas SPJ Keuangan Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jumlah berkas SPJ Keuangan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Keuangan Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya NPD Kegiatan	NPD Kegiatan	Jumlah NPD Kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Keuangan Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya LPJ Kegiatan	LPJ Kegiatan	Jumlah LPJ Kegiatan yang disusun dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Keuangan Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya Penginputan Data Transferan Rekening	Jumlah Penginputan	Jumlah Dokumen Penginputan yang diproses dalam 1 (satu) tahun	Pengelola Keuangan Bidang PKT	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Marjani

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 327 TAHUN 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

Tugas pokok : a. Subbagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset (RKKA) mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, aset, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi : a. Subbagian RKKA mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta monitoring dan evaluasi;
3. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
 7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;
 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;
 9. Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.
- c. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan di bidang Umum dan Aparatur di lingkungan BPSDM;
 3. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur;
 5. Pelaksanaan urusan di bidang Umum dan Aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Umum dan Aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

A. Jabatan Pengawas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, keuangan dan aset perangkat daerah	Jumlah Laporan/ Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada tahun 2024	Kepala Subbagian (Kasubbag) Rencana Kerja, Keuangan dan Aset (RKKA) dan Kasubbag Umum dan Aparatur	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari perbandingan antara tugas-tugas administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tugas-tugas administrasi keuangan perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024	Kasubbag RKKA	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
	Jumlah Laporan/ Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari jumlah Laporan/ Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun pada tahun 2024	Kasubbag RKKA	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari perbandingan antara tugas-tugas administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tugas-tugas administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024	Kasubbag RKKA	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
Meningkatnya layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari perbandingan antara tugas-tugas administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tugas-tugas administrasi kepegawaian perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024	Kasubbag Umum dan Aparatur dan Kasubbag RKKA	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari perbandingan antara tugas-tugas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tugas-tugas administrasi umum perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024	Kasubbag Umum dan Aparatur	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	
	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari perbandingan antara tugas-tugas pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tugas-tugas pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024	Kasubbag Umum dan Aparatur	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target indikator kinerja kegiatan ini diperoleh dari perbandingan antara tugas-tugas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tugas-tugas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024	Kasubbag Umum dan Aparatur	Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	

B. Pelaksana pada Sub Bagian RKKA

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja pada Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya Dokumen Pendukung Administrasi Kepegawaian lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja pada lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja pada lingkup Perangkat Daerah yang disusun dan diolah dalam 1 tahun anggaran	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan pada Lingkup Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPj) Fungsional Bendahara Pengeluaran	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPj) Fungsional Bendahara Pengeluaran yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Dokumen SPj Administratif Bendahara Pengeluaran	Jumlah Dokumen SPj Administratif Bendahara Pengeluaran yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Buku Kas umum	Jumlah Buku Kas umum yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Buku Pembantu Bank	Jumlah Buku Pembantu Bank yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Buku Pembantu Kas Tunai	Jumlah Buku Pembantu Kas Tunai yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Buku Pembantu Pajak	Jumlah Buku Pembantu Pajak yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Buku Pembantu Panjar	Jumlah Buku Pembantu Panjar yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Buku Pembantu Rincian Objek	Jumlah Buku Pembantu Rincian Objek yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Daftar Transaksi Harian (DTH)	Jumlah DTH yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Bendahara	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan (LRA, Neraca, LPE, LO, CaLK) yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan (LRA, Neraca, LPE, LO, CaLK) yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Verifikator Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	
	Jumlah Dokumen Surat SPj Fungsional Bendahara Pengeluaran yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Surat SPj Fungsional Bendahara Pengeluaran yang diverifikasi dalam 1 tahun anggaran	Verifikator Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Buku Kas umum yang diverifikasi	Jumlah Buku Kas umum yang diverifikasi dalam 1 tahun anggaran	Verifikator Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Buku Pembantu Pajak yang diverifikasi	Jumlah Buku Pembantu Pajak yang diverifikasi dalam 1 tahun anggaran	Verifikator Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Daftar Transaksi Harian (DTH) yang diverifikasi	Jumlah Daftar Transaksi Harian (DTH) yang diverifikasi dalam 1 tahun anggaran	Verifikator Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah kwitansi pengadaan barang/ jasa dan kelengkapannya yang diverifikasi	Jumlah kwitansi pengadaan barang/ jasa dan kelengkapannya yang diverifikasi dalam 1 tahun anggaran	Verifikator Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNS yang disusun	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNS yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PPPK yang disusun	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PPPK yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Daftar Tambahan Penghasilan PNS yang disusun	Jumlah Daftar Tambahan Penghasilan PNS yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Daftar Tambahan Penghasilan PPPK yang disusun	Jumlah Daftar Tambahan Penghasilan PPPK yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Daftar Gaji Pegawai Tidak Tetap yang disusun	Jumlah Daftar Gaji Pegawai Tidak Tetap yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Berita Acara Pendukung Kwitansi Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan penomoran	Jumlah Berita Acara Pendukung Kwitansi Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan penomoran dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan yang diarsipkan (Kuitansi beserta kelengkapannya, SPj Bendahara beserta kelengkapannya, SPP, SPM, dan SP2D)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan yang diarsipkan dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan SKPD	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPj) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPj) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Penerimaan PAD pada SKPD	
	Jumlah Buku Kas umum Penerimaan PAD	Jumlah Buku Kas umum Penerimaan PAD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Penerimaan PAD pada SKPD	
	Jumlah Kuitansi Penerimaan PAD	Jumlah Kuitansi Penerimaan PAD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Penerimaan PAD pada SKPD	
	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Penerimaan PAD pada SKPD	
	Jumlah Surat Tanda Setoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Retribusi)	Jumlah Surat Tanda Setoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Keuangan	Dokumen Pertanggung jawaban Penerimaan PAD pada SKPD	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Jumlah Laporan Barang Inventaris	Jumlah Laporan Barang Inventaris yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Jumlah Laporan Barang Pakai Habis	Jumlah Laporan Barang Pakai Habis yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Jumlah Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah (Barang Inventaris)	Jumlah Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah (Barang Inventaris) yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah (BHP)	Jumlah Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah (BHP) yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	

C. Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya bahan pendukung administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	Jumlah dokumen jadwal petugas apel PNS yang disusun	Jumlah dokumen jadwal petugas apel PNS yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah laporan bulanan kehadiran PNS yang disusun	Jumlah laporan bulanan kehadiran PNS yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah dokumen jadwal kegiatan Kepala BPSDM	Jumlah dokumen jadwal kegiatan Kepala BPSDM yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)	Pergub Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	
	Jumlah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan beserta kelengkapannya yang disusun	Jumlah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan beserta kelengkapannya yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan beserta kelengkapannya yang diadministrasikan	Jumlah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan beserta kelengkapannya yang diadministrasikan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan beserta kelengkapannya yang diproses ke Kepala BPSDM	Jumlah Surat Tugas Mengikuti Pelatihan beserta kelengkapannya yang diproses ke Kepala BPSDM dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Tersedianya bahan pendukung layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pemanfaatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan Pemanfaatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Teknisi Listrik dan Jaringan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	jumlah jadwal pemakaian sarana dan prasarana di lingkungan BPSDM	jumlah jadwal pemakaian sarana dan prasarana di lingkungan BPSDM yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Spanduk dan Baliho yang diproses dan dipasang sesuai kebutuhan	Jumlah Spanduk dan Baliho yang diproses dan dipasang dalam 1 tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang disusun (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang disusun dalam 1 tahun anggaran (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang diadministrasikan (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang diadministrasikan dalam 1 tahun anggaran (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Pengadmi-nistrasi Umum	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang diproses ke Kepala BPSDM Pegawai (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang diproses ke Kepala BPSDM dalam 1 tahun anggaran (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang didistribusikan sesuai kebutuhan (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Jumlah dokumen Surat Penugasan Koordinasi dan Konsultasi yang didistribusikan sesuai kebutuhan dalam 1 tahun anggaran (SPPD dan SPT Perjalanan Dinas)	Pengadmi-nistrasi Umum	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Pegawai /Surat Perintah Tugas yang disusun	Jumlah dokumen Surat Penugasan Pegawai /Surat Perintah Tugas yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Kepegawaian	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Pegawai /Surat Perintah Tugas yang diadministrasikan.	Jumlah dokumen Surat Penugasan Pegawai /Surat Perintah Tugas yang diadministrasikan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah dokumen Surat Penugasan Pegawai /Surat Perintah Tugas yang diproses ke Kepala BPSDM	Jumlah dokumen Surat Penugasan Pegawai /Surat Perintah Tugas yang diproses ke Kepala BPSDM dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan pada perangkat daerah	Jumlah Surat Masuk yang diadministrasikan	Jumlah Surat Masuk yang diadministrasikan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum	Pergub Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	
	Jumlah Surat Masuk yang diproses ke Kepala BPSDM	Jumlah Surat Masuk yang diproses ke Kepala BPSDM dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)		
	Jumlah Surat Masuk yang didistribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Surat Masuk yang didistribusikan sesuai kebutuhan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum		
	Jumlah Surat Keluar yang diadministrasikan	Jumlah Surat Keluar yang diadministrasikan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum		
	Jumlah Surat Keluar yang diproses ke Kepala BPSDM	Jumlah Surat Keluar yang diproses ke Kepala BPSDM dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)		
	Jumlah Surat Keluar yang didistribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Surat Keluar yang didistribusikan sesuai kebutuhan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum		

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Surat Keputusan yang diadministrasikan	Jumlah Surat Keputusan yang diadministrasikan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum		
	Jumlah Surat Keputusan yang diproses ke Kepala BPSDM	Jumlah Surat Keputusan yang diproses ke Kepala BPSDM dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris (Tata Usaha Kepala BPSDM)	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Naskah dan/atau Draf Surat Keputusan Sekda/Gubernur yang didistribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Naskah dan/atau Draf Surat Keputusan Sekda/Gubernur yang didistribusikan sesuai kebutuhan dalam 1 tahun anggaran	Pengadmi-nistrasi Umum	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kebersihan dan Pemanfaatan ruang kelas	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kebersihan dan Pemanfaatan ruang kelas yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Asrama	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kebersihan dan Pemanfaatan asrama	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kebersihan dan Pemanfaatan asrama yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Asrama	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah bahan pendukung pengelolaan Pengelolaan Informasi Publik yang disusun dan diolah	Jumlah bahan pendukung pengelolaan Pengelolaan Informasi Publik yang disusun dan diolah dalam 1 tahun anggaran	Pengolah Informasi dan Komunikasi	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah bahan pendukung penerapan Standar Pelayanan Publik yang disusun dan diolah	Jumlah bahan pendukung penerapan Standar Pelayanan Publik yang disusun dan diolah dalam 1 tahun anggaran	Pengolah Informasi dan Komunikasi	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah bahan untuk PPID yang dikumpulkan	Jumlah bahan untuk PPID yang dikumpulkan dalam 1 tahun anggaran	Pengolah Informasi dan Komunikasi	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat yang disusun	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengolah Informasi dan Komunikasi	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Teknisi Listrik dan Jaringan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan (Alasan)/Formula	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Teknisi Listrik dan Jaringan	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Peralatan Kantor untuk ruang kelas dan asrama	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Peralatan Kantor untuk ruang kelas dan asrama yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Asrama	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jaringan Air Bersih pada ruang kelas dan asrama	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jaringan Air Bersih pada ruang kelas dan asrama yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Pengelola Asrama	DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar TA. 2024	



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Marjani